

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BOJONEGORO



RENCANA KERJA T.A. 2025
RUMKIT BHAY.TK.III WAHYU TUTUKO BOJONEGORO



KEPUTUSAN KARUMKIT BHAYANGKARA TK.III WAHYU TUTUKO BOJONEGORO
Nomor : KEP / 90 /XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
RUMKIT. BHAY. WAHYU TUTUKO BOJONEGORO



KEPUTUSAN KARUMKIT BHAY WAHYU TUTUKO BOJONEGORO

Nomor : Kep / 90 / XII / 2024

tentang

RENCANA KERJA T.A. 2025

KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA WAHYU TUTUKO BOJONEGORO

Menimbang : bahwa Rencana Kerja Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro T.A. 2025, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA – KL);

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Perkap.....

7. Perkap nomor 11 tahun 2011 tentang susunan organisasi dan tata kerja RS Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama;
9. Keputusan Kepala Kepolisian daerah Jawa timur Nomor : Kep/696/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang rencana kerja Polda Jatim T.A. 2025;
9. Keputusan Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jatim nomor : KEP/293/XII/2024 tanggal 28 Desember 2024 tentang rencana kerja Biddokees Polda Jatim TA. 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KARUMKIT BHAYANGKARA WAHYU TUTUKO BOJONEGORO TENTANG RENCANA KERJA RS. BHAYANGKARA WAHYU TUTUKO BOJONEGORO

1. Rencana Kerja Rumkit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro T.A. 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro ini sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja T.A. 2025;;
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada Tanggal : 30 Desember 2024

PS KARUMKIT BHAY. WAHYU TUTUKO BOJONEGORO


dr. LINDAWATI, Sp.M
KOMISARIS POLISI NRP 78041235

DAFTAR ISI

I.	LATAR BELAKANG	
1.	Kondisi Umum	1
2.	Identifikas Masalah	9
II.	TUJUAN DAN SASARAN	
1.	Visi dan Misi	11
2.	Tujuan	12
3.	Sasaran Prioritas	14
III.	SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS	
1.	Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jatim	16
2.	Arah Kebijakan dan Strategi Bidokkes Polda Jatim	29
3.	Arah Kebijakan dan strategi RS. Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro	18
IV.	PROGRAM KEGIATAN DAN USULAN PAGU	
1.	Program dan Kegiatan	24
2.	Pagu Anggaran	26
3.	Kegiatan Pagu Anggaran	28
V.	PENUTUP	29

LAMPIRAN

1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) T.A. 2025
2. Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2025

RENCANA KERJA
RUMKIT BHAYANGKARA WAHYU TUTUKO BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

1. Kondisi Umum

Saat ini dinamika tantangan (super smart society 5.0), pengaruh global (megatrend 2045), serta tuntutan dari masyarakat pada tugas pokok Polri dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin tinggi. Hal ini membuat Polri dalam hal ini perlu menyusun perencanaan jangka panjang yang dituangkan dalam grand strategy Polri 2025-2045 sesuai dengan amanat Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2012 guna menyikapi dan mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang pesat.

Penyusunan Renja Polda Jatim T.A. 2025 ini disusun dengan maksud sebagai bentuk penjabaran visi dan misi Polda Jatim dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh Kapolri untuk mencapai program, kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Renja Polda Jatim serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*. Kebijakan Polri senantiasa mengarahkan pada terbangunnya kepercayaan publik secara terus menerus dan berkesinambungan baik yang dilaksanakan pada internal maupun eksternal kepolisian dalam rangka mewujudkan Polri yang Presisi.

Biddokkes Polda Jatim dalam melaksanakan tupoksi dan mendukung kebijakan Polri pada tahun 2025 terus melaksanakan pengkajian, percepatan perbaikan, pembaharuan dan peningkatan manajemen dan kinerja, dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro dalam hal ini merupakan satuan kerja yang berada dibawah Biddokkes Polda Jatim tentunya juga perlu menyusun rencana kerja , yang mana rencana kerja ini merupakan dokumen turunan dari rencana kerja Biddokkes sebagai Pembina Fungsi

dari Rumkit Bhayangkara Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut akan digambarkan sebagai berikut:kinerja

a. Perkembangan Aspek Kehidupan Masyarakat

Kondisi umum yang melatarbelakangi pelaksanaan tugas pokok Biddokkes Polda Jatim untuk setahun kedepan tidak lepas dari peran dan tugas Polri sesuai dengan pasal 13 Undang-undang Kepolisian 2002 sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya kondisi di bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian setahun terakhir dan tantangan tugas, prediksi serta antisipasi Tahun 2025 :

- 1) Tantangan tugas kepolisian ke depan semakin kompleks antara lain peningkatan gangguan keamanan secara intensitas dan kuantitas seperti terorisme, street crime, kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal, perlunya pengamanan pulau-pulau kecil terluar dan daerah perbatasan serta kejadian bencana perlu diantisipasi oleh fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian;
- 2) Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang sangat memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, permasalahan semakin rumit dengan meningkatnya penularan HIV/AIDS akibat pertukaran penggunaan jarum suntik dan perilaku seks bebas;
- 3) Semakin seringnya terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan angin puting beliung maupun sebab ulah manusia seperti kecelakaan baik darat, banjir bandang maupun angin puting beliung yang perlu ditangani secara intensif agar dapat dilakukan upaya pertolongan, penyelamatan dan pengamanan masyarakat, sehingga dapat mengurangi dampak bencana dan mempercepat pemulihan;

- 4) Upaya peningkatan kesejahteraan anggota Polri melalui pelayanan kesehatan dan peningkatan faskes Polri merupakan faktor yang sangat penting, dan secara langsung akan memberikan pengaruh positif terhadap kesiapan personel dan satuan Polri serta kesejahteraan masyarakat Polri secara umum yang akan menghasilkan peningkatan kinerja;
- 5) Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Polri baik jangkauan/pemerataan yang dapat dirasakan sampai tingkat Polsek maupun kualitasnya masih perlu dioptimalkan, guna dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat Polri;
- 6) Rumkit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro Biddokkes Polda Jatim sebagai salah satu fungsi pendukung tugas-tugas Polri di wilayah Bojonegoro, selalu mendayagunakan segala potensi dan kemampuannya untuk memenuhi tuntutan tersebut, dengan memantapkan komitmen dan konsistensi seluruh jajaran Dokkes Polri secara berkelanjutan dan diharapkan terselenggara pelayanan/operasional kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian yang bermutu dan sesuai dengan standar sebagaimana level kemampuan organisasi/faskes Polri.

Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Dokkes Polri yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut akan dianalisa dengan pendekatan SWOT yang digambarkan sebagai berikut:

a. Analisis SWOT

Di tengah tantangan tugas Polri semakin berat, berbagai wabah penyakit baru bermunculan, Rumah Sakit dihadapkan pada kondisi geografis dan sebaran masyarakat Polri.

Oleh karena itu Rumkit Bhayangkara Bojonegoro sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan bagi Anggota Polri, PNS dan Keluarga berupaya selalu meningkatkan kinerja dan inovasi untuk memberikan kepuasan dalam pelayanan kesehatan.

Menjawab tantangan tersebut diatas, Rumkit Bhayangkara Bojonegoro mempunyai Visi dan Misi untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal khususnya bagi Anggota Polri, PNS dan Keluarga serta masyarakat umum. Rencana Kerja Rumkit Bhayangkara Bojonegoro mengacu Renstra Rumkit Bhayangkara Bojonegoro yang bersumber dari rumusan Visi, Misi, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan Puskokes Polri serta visi, misi Rumkit Bhayangkara Bojonegoro yang mengalir kedalam program, kegiatan, sub kegiatan, bagan akun standar serta detail kegiatan sebagai hasil kesepakatan yang telah dibahas, merupakan pedoman pelaksanaan tugas dengan tujuan terdukungnya tugas pokok Polri dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat agar semakin kondusif. Di samping kerangka umum sebagaimana disebutkan diatas, Rumkit Bhayangkara Bojonegoro akan dihadapkan pada berbagai perkembangan lingkungan strategis dan perkembangan kehidupan masyarakat di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Kondisi eksternal dan internal Rumkit Bhayangkara Bojonegoro akan mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok yang sudah dianalisa dengan pendekatan teorii analisa SWOT (strenghts / kekuatan, weakness / kelemahan, opportunity / peluang, threat / ancaman) dan akan menghasilkan gambaran kondisii Rumkit Bhayangkara Bojonegoro secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut :

1) Kekuatan (*Strengths*)

- a) Letak Rumkit Bhayangkara Bojonegoro yang strategis berada di tengah-tengah kota yang mudah dijangkau oleh transporasi;
- b) Prestasi yang menonjol dalam menangani berbagai macam kasus pelayanan kesehatan terhadap Polri, PNS Polri dan keluarga untuk memperoleh kenyamanan selama menjalani rawat jalan, rawat inap maupun mendapatkan pelayanan perawatan penunjang di Rumkit Bhayangkara Bojonegoro;
- c) Terbentuknya Team DVI yang merupakan bagian integral DVA Nasional khususnya penanganan kejadian musibah masal;
- d) Adanya kerjasama dibidang fungsi Dokpol dengan BPBD, BPJS Kesehatan, PMI, dengan Kasat Lantas dan Jasa Raharja dalam penanganan Laka Lantas;

- e) Rumkit Bhayangkara Bojonegoro menjadi tempat rujukan dari RS, Puskesmas sekitarnya dan pasien BPJS dari poliklinik pratama Polres Wilayah Bojonegoro, Tuban, Lamongan serta Sub Den C Brimob ;
- f) SDM yang mencukupi terutama tenaga paramedis dan non paramedis dengan makin banyaknya tingkat Pendidikan Tinggi bidang Kesehatan di wilayah Bojonegoro;
- g) SDM yang dimiliki mempunyai toleransi yang tinggi dan disiplin yang berorientasi untuk mewujudkan personil yang berkinerja profesional dengan manajemen yang sehat untuk rekrutmen, Pendidikan, seleksi, penilaian kinerja dan jalur karir sampai masa purna bakti;
- h) Kekuatan Rumah Sakit terdiri dari dokter spesialis 1 orang organik dan 20 dokter spesialis tamu, dokter umum 9 orang, dokter gigi 2 orang, apoteker 4 orang, perawat 57 orang, bidan 19 orang, nakes lain 24 orang, non nakes lain 83 orang;
- i) Sudah terstandarisasi dengan akreditasi versi baru SNARS;
- j) Adanya kerjasama dibidang Pendidikan dalam hal praktik klinik keperawatan/kebidanan antara lain dari Lembaga Pendidikan Kesehatan;
- k) Memiliki 5 unit ambulan transportasi, 1 unit ambulan jenazah, 2 unit mobil operasional staf dan 1 unit mobil operasional pimpinan.

JUMLAH PERSONIL RS. BHAYANGKARA.

Tenaga Medis Spesialis

	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN			JUMLAH
		POLRI	PNS	KONTRAK/TAMU	
1	Dokter Spesialis Anak	-	-	2	2
2	Dokter Spesialis Anastesi	-	1	1	2
3	Dokter Spesialis Bedah	-	-	1	1
4	Dokter Spesialis Jantung	-	-	1	1
5	Dokter Spesialis jiwa	-	-	1	1
6	Dokter Spesialis Mata	-	-	1	1
7	Dokter Spesialis Obsgyn	-	-	3	3
8	Dokter Spesialis Orthopaedy	-	-	1	1
9	Dokter Spesialis Paru	-	-	1	1

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN			JUMLAH
		POLRI	PNS	KONTRAK/TAMU	
10	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	-	2	3
11	Dokter Spesialis Patologi Klinik	-	-	-	-
12	Dokter Spesialis Radiologi	-	-	1	1
13	Dokter Spesialis Saraf	-	-	2	2
14	Dokter Spesialis THT	-	-	1	1
JUMLAH		1	1	18	20

Tenaga Medis

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN			JUMLAH
		POLRI	PNS	KONTRAK/TAMU	
1	Dokter Umum	-	-	9	9
JUMLAH		-	-	9	9

Tenaga Dokter Gigi

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN			JUMLAH
		POLRI	PNS	KONTRAK/TAMU	
1	Dokter Gigi	1	1	-	2
JUMLAH		1	1	-	2

Tenaga Perawat dan Bidan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN			JUMLAH
		POLRI	PNS	KONTRAK/TAMU	
1	S1 PERAWAT	-	4	14	18
2	D3 KEPERAWATAN	-	5	40	45
3	D3KEPERAWATAN GIGI	-	-	-	-
4	SPK	-	1	-	1
5	S1 KEBIDANAN	-	-	-	-
6	D4 KEBIDANAN	-	-	-	-
7	D3 KEBIDANAN	-	4	16	20
JUMLAH		-	14	70	84

Tenaga Kesehatan Lainnya

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN			JUMLAH
		POLRI	PNS	KONTRAK/TAMU	
1	APOTEKER		1	3	4
2	S1 FARMASI			1	1
3	D3 FARMASI			2	2
4	D1 FARMASI			1	1
5	SMK FARMASI			1	1
6	D3 FISIOTERAPI			1	1
7	D4 ANALISIS MEDIS			8	8
8	S1 GIZI			1	1
9	D3 GIZI		1		1
10	D3 REKAM MEDIK			2	2
11	D3 RADIOLOGI	1		3	4
12	D4 RADIOLOGI			1	1
JUMLAH		1	2	24	27

Tenaga Non Medis

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN			JUMLAH
		POLRI	PNS	KONTRAK/TAMU	
1	S1 AKUNTANSI			3	3
2	S1 ADMINISTRASI BISNIS			1	1
3	S1 MANAJEMEN			1	1
4	SH	4			4
5	S1 ARS			1	1
6	S1 S.Pd			1	1
7	S1 KOM		1	1	2
8	D3 AKUNTANSI		1		1
9	D3 MARS			1	1
10	D3 PERHOTELAN			1	1
13	SMA / SMK	2	2	52	56
14	SMP/SD		3	5	8
JUMLAH		6	7	67	80

2) Kelemahan (*Weakness*)

- a) Jumlah personil belum sesuai DSPP Rumkit Polri tingkat III :
 - Sesuai DSPP : 51 personil
 - Personil Organik riil 40 orang (Polri13 dan PNS Polri 27);
- b) Sering berubahnya sistem pelayanan BPJS Kesehatan dari tingkat pusat maupun daerah sehingga menimbulkan pelayanan BPJS Kesehatan kurang maksimal;
- c) Belum maksimalnya kemampuan personil dokpol untuk giat dukkes Polri;
- d) Masih adanya infeksi nosokomial pada pasien rawat inap (akibat pasang kateter, jarum infuse dan infeksi luka operasi);
- e) Terbatasnya lahan untuk pengembangan Rumkit dan kurangnya lahan parkir;
- f) Belum memiliki alat untuk pengolahan limbah padat, untuk saat ini masih bekerja sama dengan instansi lain dalam proses pengolahan lahan padat.
- g) Berlakunya Undang – undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, yang mengatur praktek dokter , khususnya dokter spesialis/ ahli maksimal 3 (tiga) tempat praktek mengakibatkan banyak Rumah Sakit Bhayangkara yang mengalami kesulitan mendapatkan dokter ahli/spesialis

3) Peluang (*Opportunities*)

- a) RS Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro berada pada tempat yang strategis yang berada di tengah kota sangat memungkinkan untuk dikembangkan untuk bersaing;
- b) Tebentuknya team DVI yang merupakan bagian integral DVI Nasional khususnya penanganan kejadian musibah masal yang siap 24 jam;
- c) Adanya kerjasama dibidang fungsi Dokpol dengan BPBD Bojonegoro, BPJS Kesehatan, PMI dan dengan Kasat Lantas dan Jasa Raharja dalam penanganan Laka Lantas;
- d) Rumkit Bhayangkara Bojonegoro menjadi tempat rujukan dari RS, Puskesmas sekitarnya dan pasien BPJS dari poliklinik pratama Polres wilayah Bojonegoro, Lamongan dan Tuban;

- e) Keberadaan Rumkit Bhayangkara Bojonegoro diharapkan menjadi pilihan yang utama bagi masyarakat umum di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya;
- f) Peranan seluruh bagian dan unit RS merupakan peluang yang dikedepankan sebagai sarana Rumkit Bhayangkara Bojonegoro untuk lebih memperkenalkan berbagai jenis pelayanan unggulan yang dimiliki, agar Rumkit Bhayangkara Bojonegoro lebih dikenal masyarakat umum;
- g) Sarana dan prasarana yang dimiliki adalah modal yang kuat sebagai langkah Rumkit Bhayangkara Bojonegoro dalam membenahi sedikit demi sedikit untuk menjadi Rumah Sakit Kepolisian yang terbaik.

4) Ancaman (*Threats*)

- a) Letak geografis kota Bojonegoro menyebabkan adanya banjir karena terletak di bantaran sungai Bengawan Solo;
- b) Semakin banyaknya rumah sakit dan klinik di wilayah Bojonegoro dengan tawaran jenis pelayanan dan harga yang bersaing;
- c) Kondisi perekonomian yang belum stabil berdampak pada kebutuhan hidup dan tuntutan primer masyarakat;
- d) Kecanggihan pemeriksaan diagnostic poliklinik swasta, sehingga banyak yang memilih pemeriksaan di Poliklinik Swasta;
- e) Terbukanya perdagangan bebas masyarakat ekonomi asia (MEA) sehingga mudah masuknya tenaga dan sarana dari luar negeri.

2. Identifikasi Masalah.

Dengan mencermati kondisi umum dan hasil analisis dengan pendekatan SWOT maka permasalahan yang teridentifikasi, adalah :

- 1) Jumlah personil belum sesuai DSP Rumkit Polri Tingkat III :
 - Sesuai DSSP : 51 personil
 - Personil organik riil : 40 orang (Polri 13 dan PNS Polri : 27);
- 2) Belum siapnya sistem pelayanan BPJS Kesehatan dari tingkat pusat maupun daerah sehingga menimbulkan pelayanan BPJS kesehatan kurang maksimal;

- 3) Belum maksimalnya kemampuan personil Dokpol untuk giat dukes Polri;
- 4) Kurangnya kemampuan personil dalam Transformasi digital yang menjadi pendorong penting dalam kelangsungan layanan baik dari segi promosi maupun layanan kesehatan.
- 5) Kurangnya kemampuan personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di IGD maupun rawat inap;
- 6) Masih adanya komplain dari pasien rawat inap terkait pelayanan rawat inap dan rawat jalan;
- 7) Adanya tuntutan untuk melaksanakan akreditasi guna memenuhi standar pelayanan dan manajemen dalam memberikan pelayanan di Rumkit Bhayangkara;
- 8) Masih adanya infeksi nosocomial akibat pasang kateter, jarum infuse dan infeksi luka operasi;
- 9) Belum lengkapnya alat kesehatan yang berkualitas;
- 10) Meningkatnya minat masyarakat yang berobat di Rumkit Bhayangkara Bojonegoro;
- 11) Meningkatnya jumlah hunian pasien rawat inap;
- 12) Masih ada sarana dan prasarana Rumkit yang berusia tua sehingga perlu dilakukan pemeliharaan untuk mempanjang usia pakai.
- 13) Berlakunya Undang – undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, yang mengatur praktek dokter , khususnya dokter spesialis/ ahli maksimal 3 (tiga) tempat praktek mengakibatkan banyak Rumah Sakit Bhayangkara yang mengalami kesulitan mendapatkan dokter ahli/spesialis

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

1. Visi dan Misi

a. Polda Jawa Timur

1. Visi

“Terwujudnya Jawa Timur yang aman, Tertib dan berkeadilan melalui kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat”.

Makna Visi Polda Jatim :

Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah yang aman, tertib dan berkeadilan atas peran dan fungsi Polda Jawa Timur.

2. Misi

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat di Lingkungan Polda Jawa Timur.”

Makna Misi Polda Jatim :

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

b. Visi Misi Biddokkes Polda Jatim.

1. Visi

Untuk mewujudkan fungsi dan peran Dokkes Polri di bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian (pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaaan) yang dibutuhkan pada tugas operasional maupun pembinaan Polri harus direalisasikan secara optimal dengan kinerja tinggi serta mampu menjawab tantangan dan ancaman ke depan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, maka dirumuskan visi Biddokkes Polda Jatim tahun 2025-2029 sebagai berikut :

“Terwujudnya Pelayanan Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian yang Prima berorientasi pada PNPP dan masyarakat jajaran Biddokkes di wilayah Jawa Timur”.

Makna visi biddokkes:

Pemberian pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan bagi PNPP dan masyarakat yang prima dan profesional

2) Misi

” Menyelenggarakan kedokteran kepolisian dan pelayanan kesehatan prima pada PNPP dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana jajaran Biddokkes di wilayah Jawa Timur”.

Makna misi biddokkes:

Menyelenggarakan kedokteran kepolisian untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri serta pelayanan kesehatan kepolisian secara profesional, modern, dan akuntabel di wilayah Jawa Timur

c. Visi dan Misi Rumkit Bhayangkara Bojonegoro.

1) Visi.

Untuk mewujudkan fungsi dan peran Rumkit Bhayangkara Tk.III Wahyu Tutuko Bojonegoro di bidang Kedokteran Kepolisian dan kesehatan Kepolisian (pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaaan) yang dibutuhkan pada tugas opsional maupun pembinaan Polri harus direalisasikan secara optimal dengan kinerja tinggi serta mampu menjawab tantangan dan ancaman kedepan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, maka dirumuskan visi Rumkit Bhayangkara Tk.III Wahyu Tutuko Bojonegoro sebagai berikut :

“Terwujudnya Pelayanan Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian yang Prima berorientasi pada PNPP dan masyarakat di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya”.

Makna visi Rumkit Bhayngkara Tk.III Wahyu Tutuko Bojonegoro:

Pemberian pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan bagi PNPP dan masyarakat yang prima dan profesional

2) Misi.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, maka Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro mempunyai Misi sebagai berikut :

“Menyelenggarakan kedokteran kepolisian dan pelayanan kesehatan prima pada PNPP dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya”.

Makna misi Rumkit Bhayngkara Tk.III Wahyu Tutuko Bojonegoro:

Menyelenggarakan kedokteran kepolisian untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri serta pelayanan kesehatan kepolisian secara profesional, modern, dan akuntabel di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya

2. Tujuan

a. Polda Jawa Timur

1. Meningkatnya pelayanan penegakan hukum Polda Jatim yang mengutamakan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, inklusivitas dan profesionalisme;
2. Menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur secara proaktif dan antisipatif;
3. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polda Jatim agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polri yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;
4. Tersedianya infrastruktur dan peralatan strategis di lingkungan Polda Jatim yang mendukung operasional kepolisian, pemeliharaan Kamtibmas, pelayanan publik serta penegakan hukum yang berkualitas, profesional, efektif, mudah diakses dan inklusif;
5. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Polda Jatim dan jajarannya.

b. Biddokkes Polda Jatim

1. Mewujudkan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian yang modern dan berstandar internasional;
2. Melaksanakan pelayanan Kesehatan yang prima dan akuntabel;
3. Menerapkan manajemen dokkes polri yang akuntabel dan berintegritas serta agile dan modern.

c. Rumkit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro

1. Mewujudkan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian yang modern dan berstandar internasional;
2. Melaksanakan pelayanan Kesehatan yang prima dan akuntabel;
3. Menerapkan manajemen dokkes polri yang akuntabel dan berintegritas serta agile dan modern

2. Sasaran Prioritas

3. a. Sasaran Prioritas Polda Jatim 2025

Sebagaimana penjabaran sasaran prioritas Polri Tahun 2025 maka adapun sasaran prioritas Polda Jatim Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut :

1. **Pertama** “Memelihara kamtibmas di wilayah Jawa Timur inovatif secara prediktif dan proaktif;
2. **Kedua** “Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda JawaTimur yang inovatif berbasis digital;
3. **Ketiga** “Menegakkan hukum secara Adil, Transparan, Legal, Humanis, di wilayah hukum Polda Jatim berdasarkan *Scientific Criminal Investigation (SCI)*;
4. **Keempat** “Mewujudkan pengelolaan SDM Polda jatim yang Modern dan Transparan serta kapasitas SDM Polda Jatim yang Sehat, Cerdas, Berintegrasi dan Profesional;
5. **Kelima** “Mengembangkan Almitsus, Perbekalan dan fasilitas konstruksi Polda Jatim yang modern dan memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi berbasis Minimum Esensial Police Equipment (MEPE);

6. **Keenam** “Meningkatkan Budaya Integritas, Akuntabilitas dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian di wilayah hukum Polda Jawa Timur

b. Sasaran Prioritas Biddokkes Polda Jatim 2025

1. Mewujudkan kualitas pelayanan publik pada dokkes polri yang semakin inovatif berbasis digital;
2. Penguatan peran dan fungsi dokkes guna mendukung penegakan hukum secara adil, transparan, legal, dan humanis berdasarkan *Scientific Criminal Investigation* (SCI);
3. Mewujudkan pengelolaan SDM dokkes polri yang modern dan transparan serta pembangunan kapasitas SDM yang sehat, cerdas, berintegritas, dan profesional;
4. Pemenuhan sarana prasarana, almatsus polri, dan fasilitas konstruksi polda jatim yang modern dan memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi berbasis *Minimum Essensial Police Equipment* (MEPE);
5. Mewujudkan Dokkes polri melalui peningkatan budaya integritas akuntabilitas dan kehormatan setiap pelaksanaan tugas kepolisian;

c. Sasaran Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro.2025

1. Mewujudkan kualitas pelayanan publik pada dokkes polri yang semakin inovatif berbasis digital;
2. Penguatan peran dan fungsi dokkes guna mendukung penegakan hukum secara adil, transparan, legal, dan humanis berdasarkan *Scientific Criminal Investigation* (SCI);
3. Mewujudkan pengelolaan SDM dokkes polri yang modern dan transparan serta pembangunan kapasitas SDM yang sehat, cerdas, berintegritas, dan profesional;
4. Pemenuhan sarana prasarana, almatsus polri, dan fasilitas konstruksi polda jatim yang modern dan memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi berbasis *Minimum Essensial Police Equipment* (MEPE);
5. Mewujudkan Dokkes polri melalui peningkatan budaya integritas akuntabilitas dan kehormatan setiap pelaksanaan tugas kepolisian

BAB III

SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Arah Kebijakan dan sasaran Strategi Polda Jatim

a. Sasaran Prioritas I **“Memelihara kamtibmas di wilayah Jawa Timur secara prediktif dan proaktif”** terdiri dari 9 (Sembilan) arah bijak sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja Polda Jatim dalam melaksanakan deteksi aksi guna menjaga Kamtibmas;
2. Menurunkan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang produktif;
3. Mengoptimalkan kegiatan “PemolisianPrediktif” dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat (cooling system) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;
4. Mengedepankan penanganan konflik secara humanis;
5. Meningkatkan Kamseltibcarlantas bagi masyarakat guna memberikan rasa aman saat terjadi kemacetan dan saat jam rawan kejahatan;
6. Meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polda Jatim di wilayah rawan gempa dan bencana alam dan *Slum area*;
7. Meningkatkan penggelaran kekuatan operasional Kepolisian di kewilayahan Polda Jatim dalam pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan menjalin sinergritas polisional dengan stakeholder terkait serta menangani gangguan keamanan;
8. Meningkatkan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polda Jatim di seluruh wilayah Jawa Timur guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;
9. Meningkatkan penguatan Polda Jatim dibidang keamanan pada pulau berpenghuni;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

1. Meningkatkan Meningkatkan kinerja Polda Jatim dalam melaksanakan deteksi aksi guna menjaga Kamtibmas; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a. Memetakan potensi gangguan ,terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan situasi gangguan Kamtibmas lainnya; (giat 3112, 3114, 3115, 3116,3117, 3150/prog Harkamtibmas/SP1); melakukan Lidikpamgal dengan fokus pada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; (giat 3112, 3114, 3115,3116,3117,3150/prog Harkamtibmas/SP1);
2. Menurunkan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang produktif; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a. Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang dalam memberikan konsultan dalam pemecahan masalah yang terjadi ditengah masyarakat;(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
- b. Pemberdayaan potensi masyarakat sebagai antisipasi terhadap gangguan Kamtibmas lainnya (Narkoba, Terorisme, Kejahatan Konvensional lainnya, dll). (giat 5076/prog Harkamtibmas /SP 1);
- c. Penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerjasama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal dan deradikalisasi; (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
- d. Patroli konten dan kontra narasi pada kanal-kanal media online dan media sosial yang sehat menjadi saluran penyebaran propaganda kelompok teroris; (giat 3143/prog Lidik sidik/SP 1);
- e. Peningkatan jumlah konten edukasi pada media sosial; (giat 3143/prog Lidik sidik/SP
- f. Peningkatan jumlah kegiatan kampanye Siber MII kanal Siber TV; (giat 3143/prog Lidik sidik/SP 1);
- g. Menetralisir dan menekan isu serta berita negatif yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas; (giat 3149/prog Dukma/SP 1);
- h. Melaksanakan Patroli Perintis Presisi dan Patroli Kota Presisi sebagai eskalasi gangguan Kamtibmas yang terjadi berdasarkan perkiraan inteljen yang ada; (giat 3143/prog lidik sidik/SP 1);
- i. Peningkatan kegiatan bintibmas masyarakat pesisir guna menekan gangguan terorisme dengan memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut;(giat 3155/prog Harkamtibmas/SP 1);
- j. Meningkatkan patroli di wilayah masyarakat pesisir dan sepanjang garis pantai dalam rangka melaksanakan pengamanan pencegahan terorisme dan penegakkan hukum di wilayah perairan Jawa Timur; (giat 3155/prog Harkamtibmas/SP 1);
- k. Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang kepada kelompok kontra radikal dan kepada masyarakat terkait pencegahan kejahatan; (giat 3149/prog Dukma/SP 1);
- l. Melaksanakan Patroli secara berkala dan continue pada daerah rawan gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polda Jatim; (giat 3130/prog Harkamtibmas/SP

- m. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan risk assesmen pada obyek vital nasional dan obyek tertentu (giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/);
 - n. Memetakan potensi aksi terorisme dan kontra radikalisme melalui lidikpamgal intel brimob serta konflik sosial dan gangguan keamanan lainnya dengan membuat zona back up wilayah sesuai dengan lokasi Kompi jajaran Satbrimobda Jatim; (giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/);
 - o. Meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata serta memberikan layanan pengawalan VIP; (giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/); yang aktif serta para penyelenggara penyelenggara fungsi pertahanan dan keamanan dalam negeri guna mewujudkan situasi keamanan yang kondusif; (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/);
3. Mengoptimalkan kegiatan “Pemolisian Prediktif” dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat (cooling system) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a. Pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan program “Polisi RW” dan asistensi penguatan KBPPP (Keluarga Besar Putra Putri Polri); (giat 3133/prog Harkamtibmas/SP 1/);
- b. Peningkatan giat Siskamling dan Satkamling guna meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberdayakan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan yang ada dilingkungan masing-masing; (giat 3128/prog Harkamtibmas/SP 1/);
- c. Peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan Kepolisian terbatas kepada BUJP, satpam dan Polsus; (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 21, renaksi 79, 80);
- d. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan atau patroli berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan gangguan Kamtibmas dan rawan bencana alam sesuai skala prioritas dalam bentuk Patroli Perintis Presisi dan Patroli Kota Presisi; (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/);
- e. Melakukan kegiatan patroli dialogis pada daerah rawan kejahatan (pemukiman, terminal, pasar, pelabuhan, dll); (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/);

- f. Melaksanakan penegakan hukum terbatas terhadap terjadinya Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang terjadi di tengah masyarakat.(giat 5076/prog Harkamtibmas /SP 1);
 - g. Pelaksanaan binluh Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas dengan sasaran masyarakat tidak terorganisir (Kawasan Pasar, Terminal, Tempat Wisata); (giat 3133/prog Harkamtibmas/SP1);
Pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan peran aktif masyarakat seperti Lomba Polisi Sahabat Anak atau Polisi Cilik usia Sekolah Dasar tingkat polres jajaran dan pelaksanaan pemilihan duta lalu lintas yang melibatkan masyarakat umum sebagai peserta dengan sasaranm pelajar SMA/SMK/Sederajat dan Mahasiswa/i. (giat 3133/prog Harkamtibmas/SP1);
4. Mengedepankan penanganan konflik secara humanis;
- Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a. Pemberian penyuluhan kontra radikal kepada Ormas/Komunitas dengan metnilai nilai dasar Pancasila guna turut berpartisipasi meredam gejolaksosial yang terjadi masyarakat yang dapa menimbulkan konflik sosial; (giat 3112/prog Harkamtibmas/SP
 - b. Mengoptimalkan peran para Bhabinkamtibmas dalam deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis; (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
 - c. Penggalangan terhadap individu, kelompok, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, BEM, LSM dan beberapa serikat buruh maupun media sosial serta kerja sama dengan instansi terkait. (giat 3112/prog Harkamtibmas/SP 1);
5. Meningkatkan Kamseltibcarlantas bagi masyarakat guna memberikan rasa aman saat terjadi kemacetan dan saat jam rawan kejahatan;
- Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a. Meningkatkan kegiatan Patroli, penjagaan di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan serta berperan aktif mengajak masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas; (giat 3130, 3133/prog Harkamtibmas/SP 1);
 - b. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan atau Patroli berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan gangguan Kamtibmas dan rawan bencana alam sesuai skala prioritas dalam bentuk Patroli Perintis Presisi dan Patroli Kota Presisi;(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1);

- c. Melanjutkan pelaksanaan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas dengan sasaran Masyarakat terorganisir (Sopir Bus/AKDP/ Pariwisata/Gojek, Sopir Truk, Pelajar, Mahasiswa/i, TK/Paud); (giat 3130, 3133/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1);
 - d. Melaksanakan kegiatan Turjawali di daerah yang rawan kriminalitas dan berperan aktif mengimbau masyarakat dalam rangka mewujudkan Kamtibmasdiwilayahnya masing-masing. (giat 3133/prog Harkamtibmas/SP 1);
 - e. Bekerjasama dengan stakeholder untuk melakukan review andal lalin pada objek vital sehingga dapat dilakukan langkah-langkah manajemen rekayasa lalu lintas sehingga dapat terwujud Kamseltibcarlantas; (giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1);
 - f. Mengoptimalkan database tentang blackspot, troublespot, jalan rawan bencana, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kondisi jalan, dan seluruh permasalahan lalu lintas sebagai big data dalam memberikan Dikmas lintas sehingga tepat guna dan tepat sasaran (giat 3130, 3133/prog Harkamtibmas/SP 1/);
 - g. melaksanakan Patroli Perintis Presisi dan Patroli Kota Presisi sebagai eskalasi gangguan Kamtibmas yang terjadi berdasarkan perkiraan inteljen yang ada.(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1);
6. Meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polda Jatim di wilayah rawan gempa dan bencana alam dan *Slum area*;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a. Pelaksanaan kontinjensi dengan pengelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian di wilayah rawan dan bencana; (giat 3130, 5081, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, 32 renaksi 74, 78,129);
 - b. Menyiapkan personel Polda Jatim yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggap segeraan serta membangun sinergisitas kemitraan dengan stakeholders dalam penanggulangan bencana alam; (giat 5087/prog Harkamtibmas/SP 1);
 - c. Menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan penanganan SAR terbatas oleh personil Sabhara, Brimob dan bantuan satwa dalam menghadapi ketanggapsegeraan penanggulangan bencana; (giat 3130, 5081, 5087/prog

Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, 32 renaksi 74, 78,129);

- d. Mengoptimalkan pengamanan dan *back up* satuan kewilayahan dengan menggunakan bantuan satwa dalam rangka bantuan SAR terbatas penanganan bencana alam; (giat 3072, 5076/prog Dukma/SP 1/SS 1);
 - e. Meningkatkan Pelatihan melalui kerjasama dengan Badan Sar Nasional dan Penggiat Komunitas SAR Pengguna Satwa, seperti BNPB Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan SAR Daerah (Basarda); (giat 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1); peningkatan kerjasama Intansi, Pembinaan Jaringan dan Kemitraan, Forum Komunikasi Polisi Dan Masyarakat (FKPM), Pokdar kamtibmas dan Fokus Group Discussion FGD Mitigasi bencana wilayah; (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
 - f. Membentuk Tim Trauma Healing bagi korban bencana alam; (giat 3130, 5081/prog Harkamtibmas/SP 1)
 - g. Melaksanakan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapan satwa dalambantuan SAR terbatas penanganan bencana alam. (giat 3130, 5081/prog Harkamtibmas/SP 1).
7. Meningkatkan penggelaran kekuatan operasional Kepolisian di kewilayahan Polda Jatim dalam pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan menjalin sinergitas polisional dengan stakeholder terkait serta menangani gangguan keamanan;
- Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a. Melaksanakan kegiatan KRYD fungsi Binmas untuk pencegahan terhadap munculnya aliran radikalisme dan anti pancasila serta kenakalan remaja dan gangguan Kamtibmas yang dapat meresahkan masyarakat; (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
 - b. Penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi sesuai dengan tindakan Kepolisian yang berlaku serta mengoptimalkan kekuatan personel Polda Jatim yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; (giat 5079, 5080, 5087/prog 4/SP 1)
 - c. Meningkatkan kesiapan personel di Ditsamapta Polda Jatim Untuk mampu digerakan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, dan konflik sosial; (giat 5079, 5080, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1);
 - d. Melaksanakan pelayanan pengamanan unjuk rasa damai (situasi hijau)

sampai unjuk rasa menyimpang (situasi kuning) dengan mengedepankan sikap humanis dan menjunjung tinggi HAM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (giat 5079, 5080, 5087/prog Harkamtibmas /SP 1);

- e. Memperkuat kembali sistem rayonisasi zona back up Satwil sesuai dislokasi Kompi jajaran Satbrimob Polda Jatim guna kecepatan dalam menindak lanjuti gangguan Kamtibmas; (giat 5087/prog Harkamtibmas/SP 1);
- f. Menyiapkan pasukan sebagai *Power On Hand* Kapolda yang siap di gerakkan setiap saat; (giat 3130, 5076, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1);
- g. Meningkatkan program quick response anggota Satbrimob Polda Jatim dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, (giat 3130, 5076, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1);
- h. Mengoptimalkan jumlah pasukan yang ada pada tiap Kompi jajaran untuk BKO Satwil dan menyisakan personil cadangan untuk status siaga on call (giat 3130, 5076, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1);
- i. Membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang aktif guna mewujudkan situasi keamanan yang kondusif; (giat 5076, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1); Memberdayakan Bhabinkamtibmas/ polisi RW untuk hadir di t e n g a h - t e n g a h masyarakat setiap hari guna mengajak masyarakat selalu bersatu, bersinergi dan aktif dalam giat pencegahan terhadap gangguan Kamtibmas; (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS
- j. Meningkatkan kerjasama intansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan FGD, FKPM pembinaan jaringan Pok KKB, sosialisasi melalui DDS dengan masyarakat secara masiv; (giat 5076, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1).
- k. Meningkatkan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polda Jatim di seluruh wilayah Jawa Timur guna mendukung terlaksananya pengamanan laut; Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan
- l. Meningkatkan patroli di wilayah industri (kawasan tertentu), pariwisata serta di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai dalam rangka pengamanan perairan dan penegakkan hukum di wilayah perairan Jawa Timur; (giat 3134, 4342/prog Harkamtibmas/SP 1);
- m. Peningkatan kegiatan bintibmas perairan guna menekan gangguan kamtibmas dengan memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan

laut. (giat 3135/prog 4/SP 1/SS 1).

8. Meningkatkan penguatan Polda Jatim dibidang keamanan pada pulau berpenghuni; Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a. Meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas, kemacetan dan laka lantas serta obvit/obvitnas dalam rangka penguatan Polri dibidang keamanan pada pulau berpenghuni; (giat 3130, 3131, 3135/prog Harkamtibmas/SP 1);
 - b. Meningkatkan pelacakan dan penangkalan ditempat keramaian, rawan kejahatan dalam rangka penguatan Polda Jatim dibidang keamanan pulau berpenghuni; giat 5081/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46);
 - c. Membangun kemampuan kolaborasi operasional Polda Jatim dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pulau terluar dan berpenghuni serta meningkatkan kegiatan pengawasan (pre-emptif, preventif dan melakukan penegakan hukum awal) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah baik darat maupun laut; (giat, 3130, 5087, 3134/progharkamtibmas/SP1).
- b. Sasaran Prioritas II **“Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Jawa Timur yang inovatif berbasis digital”** terdiri dari 3 (Tiga) arah bijak sebagai berikut:
 1. Modernisasi sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi guna mencapai kualitas pelayanan publik Polda Jatim;
 2. Meningkatkan profesionalisme anggota Polda Jatim dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polda Jatim;
 3. Mengoptimalkan “ketanggap segerakan” dalam melayani Masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut

1. Modernisasi sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi guna mencapai kualitas pelayanan publik Polda Jatim; Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a. Mengoptimalkan perbaikan dan pemeliharaan alat komunikasi radio dan jaringan komunikasi data guna menjangkau jaringan komunikasi antar Polsek, Polres dan Polda; (giat 3071/prog Dukma/SP 2);

- b. Mengoptimalkan kerjasama dengan dengan instansi terkait (Pemkot Surabaya, Dishub Jatim dan PT. Telkom) (giat 3071/prog Dukma /SP 2);
 - c. Penambahan dan peningkatan kapasitas Bandwidth di Mapolda Jatim, Mako Polres dan Polsek jajaran Polda Jatim; (giat 3071/prog Dukma /SP 2);
 - d. Melanjutkan inovasi layanan publik yang efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal; (giat 3133, 3084/prog Harkamtibmas, prog Almatsus Sarpras Polri/ SP 2).
2. Meningkatkan profesionalisme anggota Polda Jatim dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polda Jatim; Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a. Mengoptimalkan operator (out sourcing) untuk helpdesk support aplikasi Binmas Online System (BOS); (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 2);
 - b. Pemanfaatan BOS V2 oleh Bhabinkamtibmas dengan kegiatan: FGD Bidang Bhabinkamtibmas serta mengembangkan kemampuan sesuai Tupoksi dan pendampingan dana desa serta pencegahan pungli di wilayah hukum Polda Jatim dan melaksanakan giat Evaluasi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat pada (penyaluran bantuan sosial dari Kementrian Sosial RI. (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 2);
 - c. Meningkatkan optimalisasi dan inovasi sistem pelayanan secara berbasis IT dalam rangka penerbitan BPKB, STNK, SKCK, perizinan / pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial berupa implementasi pelayanan sesuai SOP dan perundangan yang berlaku; (giat 3084, 3133/prog Almatsus Sarpras Polri, prog Harkamtibmas/SP 2);
 - d. Membuat sistem manajemen informasi layanan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pengurusan surat ijin operasional perusahaan, pembuatan KTA satpam; (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 2);
 - e. Inventarisasi kebutuhan materiel SBST guna mendukung percepatan layanan kepada masyarakat sehingga produk layanan dapat langsung diterima oleh Masyarakat dan Menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan pengecekan langsung ke tempat pelayanan; (giat 3072/prog Dukma/SP 2);
 - f. Mengoptimalkan layanan unggulan Samsat MTC (Monitoring Tracking

- Checklist) dan optimalisasi penggunaan Samsat Digital Nasional (SIGNAL) serta Optimalisasi penggunaan aplikasi SINAR (SIM online nasional) dalam pelayanan perpanjangan SIM; (giat 3112/prog Harkamtibmas/SP 2);
- g. Melakukan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap bulan; (giat 3072/prog Dukma/SP 2);
- h. Meningkatkan pelayanan publik Polda Jatim dengan melaksanakan pelayanan prima dan informasi melalui aplikasi Yankes Presisi dan Rikkes berkala; (giat 3070/prog Dukma/SP 2);
- i. Penguatan materi “Pelayanan Publik” bagi siswa Diktuk, Prolat Fungsi Teknis Kepolisian serta Dikbangspes dengan pemanfaatan teknologi digital/IT; (giat 3070/prog Dukma/SP 2);
- j. Melaksanakan pelatihan kompetensi secara berkala guna meningkatkan kemampuan personil dalam melaksanakan pelayanan; (giat 3072/prog Dukma/SP 2).
- k. Mengupayakan Sarpras Pendidikan berbasis IT melalui Polda Jatim maupun Lemdiklat Polri; (giat 3070/prog Dukma/SP 2).
- l. Mengoptimalkan “ketanggap segera” dalam melayani Masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
1. Meningkatkan kecepatan kehadiran Samapta mendatangi TKP didukung kesiapan sarpras yang dimiliki serta dengan koordinasi satuan fungsi terkait (quick respons) (giat 3130/prog Harkamtibmas/SP 2);
 2. Mengoptimalkan “*respon time*” dalam memberikan bantuan teknis Satwa dalam melakukan pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban; (giat 3072/prog Dukma/SP 2);
 3. Melaksanakan giat deteksi dini narkoba segera guna mendeteksi dampak penyalahgunaan narkoba di masyarakat; (giat 3073/prog Dukma/SP 2).
 4. Kemudahan pemberian surat rujukan untuk FKTP ke FKTL dengan berbasis Pcare; (giat 3073/prog Dukma/SP 2).
 5. Melakukan penanganan bencana DVI dengan profesional dan terintegrasi. (giat 3073/prog Dukma/SP 2).
- m. Sasaran Prioritas III **“Menegakkan hukum secara Adil, Transparan, Legal, Humanis, di wilayah hukum Polda Jatim berdasarkan *Scientific Criminal Investigation (SCI)*”**, terdiri dari 4 (Empat) arah bijak sebagai berikut:

1. Peningkatan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana terhadap empat jenis kejahatan yang meliputi kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi guna memenuhi rasa keadilan dimasyarakat Jawa Timur;
2. Melaksanakan pelatihan sertifikasi penyidik dalam rangka peningkatan kompetensi penyidik sesuai dengan fungsinya di era 5.0;
3. Meningkatkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;
4. Meningkatkan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal dalam rangka peningkatan pengawasan penyidikan; **Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut** Peningkatan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana terhadap empat jenis kejahatan yang meliputi kejahatan konvensional,transnasional,terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi guna memenuhi rasa keadilan dimasyarakat Jawa Timur;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a. Meningkatkan dan mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakkan hukum kasus- kasus keamanan negara terkait kejahatan: Ideologi Negara, Lingkungan Hidup, Terorisme, Korupsi Narkoba, TPPU, TPPO dan Siber; (giat 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 5083, prog Lidik Sidik /SP 3);
- b. Meningkatkan kerja sama antar penegak hukum di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; (giat 3141/prog Lidik Sidik/SP 3);
- c. Melakukan penyelidikan yang terfokus pada pencegahan potensi aksi radikal, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berbasis IT (siber); (giat 3145/prog Lidik Sidik/SP 3);
- d. Peningkatan koordinasi keamanan laut antar penyidik dan peningkatan penegakan hukum terhadap kejahatan di wilayah hukum perairan Jatim (giat 3151/prog Lidik Sidik/SP 3);
- e. Melaksanakan penyelesaian perkara melalui Restorative Justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan; (giat 3130, 5083/prog Lidik Sidik/SP 3);

- f. Melanjutkan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan mengelola inventarisasi barang bukti secara transparan dan akuntabel (giat 3141, 3140/prog Lidik Sidik/SP 3);
- g. Mendorong kinerja penyidik/penyidik pembantu dalam menangani perkara dengan membuat rengiat sesuai RTL yang telah dibuat; (giat 5085/proglidik Sidik/SP3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 96);
- h. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegak hukum
- i. Melanjutkan dan meningkatkan cakupan data serta kemampuan forensik (labfor dan inafis) dalam pemeriksaan barang bukti dan pengelolaan tempat kejadian perkara (Crime Scene Investigation) melalui sertifikasi dan akreditasi; (giat 3140, 3141/prog Lidik Sidik/SP 3);
- j. Penyelenggaraan laboratorium forensik dalam rangka bantuan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;(giat 3141/prog Lidik Sidik/SP 3).
- k. Melaksanakan pelatihan sertifikasi penyidik dalam rangka peningkatan kompetensi penyidik sesuai dengan fungsinya di era 5.0;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a. Peningkatan kualitas profesi dengan mengikutsertakan penyidik/penyidik pembantu dalam mengikuti Dikjur/Dikbang sesuai fungsinya di era 5.0 (giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 3);
- b. Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan dan sertifikasi pemeriksa di bidang laboratorium forensik sesuai dengan bidang nya masing-masing(giat 3137/prog Lidik Sidik/SP 3);
- c. Melakukan Pelatihan dan pengembangan terhadap anggota / pemeriksa sehingga menjadi terampil dan profesional dan dapat memberikan pelayanan terbaik. (giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 3).
- d. Meningkatkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparasi dan akuntabilitas dalam penagakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Mengoptimalkan peran pengawasan melekat atas penyidik dan peran dari wassidik guna mengawasi prses penyidikan agar berjalan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (giat 3137, 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);

- e. Mempermudah akses informasi kepada masyarakat SP2HP online; (giat 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);
 - f. Mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum dan menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta transaksional; (giat 5086/prog Lidik Sidik/SP 3); (giat 5086/prog lidik Sidik/SP 3);
 - g. Mengikutsertakan penyidik/penyidik pembantu dalam mengikuti Dikjur/Dikbang di bidang Reserse; (giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 3);
 - h. Melaksanakan penyelesaian perkara melalui perkara Restorative Justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun kepada kemanfaatan dan keadilan; (giat 5086/prog Lidik Sidik /SP 3);
 - i. Memberikan SP2HP2 agar tidak melebihi batas waktu/ time line yang sudah ditentukan kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka; (giat 3137, 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);
5. Meningkatkan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal dalam rangka peningkatan pengawasan penyidikan;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a. Mengintegrasikan pelayanan dan penyajian data informasi kriminal antar Satker Ditreskrim, Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba Polda Jatim serta institusi penegak hukum lainnya yang mudah diakses oleh petugas dan masyarakat guna memudahkan identifikasi serta ungkap kasus kejahatan; (giat 5083/prog Lidik Sidik/SP 3);
- b. Mengoptimalkan e-MP(e- manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan penyidikan perkara dan transparansi (giat 5086/prog Lidik Sidik/SP3);
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan Gelar Perkara (giat3137, 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);

2. Arah Kebijakan dan Strategi Biddokkes Poldasatim tahun 2025

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan kebijakan Biddokkes Poldasatim maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi Biddokkes Poldasatim pada Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Sasaran prioritas **"Memantapkan peran dokkes polri dalam memelihara kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia secara prediktif dan proaktif"** terdiri dari 7 (tujuh) arah bijak sebagai berikut:

1. Mengedapankan peran dokkes polri dalam penanganan konflik secara humanis;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a. Melaksanakan bhakti kesehatan polri;
 - b. Memberikan dukungan keslap pada pasukan polri di daerah konflik;
 - c. Pemetaan dan pembuatan data base DNA berkaitan dengan penanganan konflik;
 - d. Pemetaan dan pembuatan data base odontogram berkaitan dengan penanganan konflik
3. Meningkatkan peran Dokkes dalam mengoptimalkan Kamseltibcar lantas guna memberikan rasa aman di tengah masyarakat baik saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
 - a. Menyusun pedoman pelaksanaan rikkes SIM;
 - b. Melaksanakan rikkes SIM;
 - c. Memenuhi kebutuhan sarpras;
 - d. Pemeriksaan narkoba dan alkohol pada pengemudi berkolaborasi dengan *stakeholder* terkait;
4. Meningkatkan dan melanjutkan peran aktif dokkes polri di wilayah rawan gempa, bencana, dan slum area;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
 - a. Menyelenggarakan Bhakti sosial kesehatan polri;
 - b. Memberikan dukungan keslap pada pasukan polri di daerah rawan bencana;
 - c. Pengambilan sampel DNA dan odontogram berkaitan dengan korban bencana (DVI);
 - d. Memberikan dukungan evakuasi korban bencana;
 - e. Memberikan dukungan pelaksanaan olah TKP Aspek Medik.

5. Meningkatkan penggelaran fungsi dokkes dalam operasional kepolisian dan back up kewilayahan dalam rangka pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik, dan menjalin sinergitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan;.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
 - a. Menyiapkan personel, sarpras dan anggaran;
 - b. Memberikan dukungan keslap pada pasukanpolri di daerah konflik;
 - c. Membentuk tim satgas untuk pelaksanaan back up kewilayahan;
 - d. Melaksanakan pelatihan untuk mempersiapkan personel
6. Meningkatkan kerjasama kepolisian di bidang dokkes polri dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
 - a. Meningkatkan kerjasama Dalam/Luar Negeri di bidang Dokpol;
 - b. Meningkatkan kerjasama Dalam/Luar Negeri di bidang Kespel;
 - c. Meningkatkan kerjasama Dalam/Luar Negeri dibidang Laboratorium Dokkes;
 - d. Meningkatkan kerjasama Dalam/Luar negeri di bidang Sumber Daya.
7. Mendukung kegiatan tahapan pengamanan event nasional/internasional tahun 2025;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
 - a. Meningkatkan kesiapan personel, sarpras, dan anggaran dalam rangka pembentukan tim keslap, *food safety* dalam pamkes *event* nasional/internasional serta pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun 2025;
 - b. Melaksanakan asistensi dan supervisi kegiatan pamkes event nasional/internasional serta pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun 2025;
 - c. Meningkatkan kesiapan tim DVI pada event nasional/internasional serta pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun 2025;
8. Meningkatkan peran aktif Polda Jatim di wilayah rawan gempa dan bencana alam dan *Slum Area*;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a. Bersama instansi terkait melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat yang berdampak bencana;
 - b. Mengoptimalkan pengaman dan back up satuan kewilayahan dengan menggunakan bantuan satwa dalam rangka bantuan SAR terbatas penanganan bencana alam);.

b. Sasaran prioritas **"Mewujudkan kualitas pelayanan publik pada dokkes polri yang semakin inovatif berbasis digital"**, terdiri dari 3 (tiga) arah bijak sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia pada sentra pelayanan publik pada dokkes polri yang berbasis TI (Teknologi Informasi);

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a. Menerapkan layanan dokkes polri berbasis TI (teknologi Informasi);
 - b. Menyiapkan fasyankes dokkes polri yang modern dan berkualitas;
 - c. Pengembangan sistem informasi digital fungsi dokkes yang terintegrasi;
2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kedokteran dan kesehatan Polri baik dari FKTP maupun dari RS Bhayangkara;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan

- a. Menyiapkan SDM dokkes yang memenuhi persyaratan standar tinggi di bidang kompetensi teknis, leadership dan kompetensi etik;
 - b. Menyelenggarakan fasyankes yang terakreditasi;
 - c. Melaksanakan pengawasan internal dan eksternal pad ajajaran dokkes polri;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta supervisi jajaran dokkes polri;
 - e. Melaksanakan zona integritas untuk mewujudkan WBK/WBBM.
 - f. melakukan penilaian indeks kepuasan Masyarakat (IKM) setiap bulan;
 - g. meningkatkan pelayanan publik polda Jatim dengan melaksanakan pelayanan prima dan informasi melalui aplikasi yankes presisi dan rikkes berkala;
3. Mengoptimalkan "ketanggapsegeraan" dalam melayani masyarakat sesuai standar operasional prosedur (SOP);

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a. Melaksanakan "ketanggapsegeraan" melalui bidang Dokpol;
- b. Melaksanakan "ketanggapsegeraan" melalui bidang:kesemaptaan
- c. Menyelenggarakan fasyankes yang terakreditasi.
- d. Mengoptimalkan "respon time" dalam memberikan bantuan teknis satwa dalam melakukan pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban;
- e. Melaksanakan giat deteksi dini narkoba segera guna mendeteksi dampak penyalahgunaan narkoba di masyarakat;
- f. Kemudahan pemberian surat rujukan untuk FKTP ke FKTL dengan berbasis Pcare;

- g. Melakukan penanganan bencana DVI dengan professional dan terintegrasi
- c. Sasaran Prioritas **"Penguatan peran dan fungsi Dokkes guna mendukung penegakkan hukum secara adil, transparan, legal, dan humanis berdasarkan *Scientific Criminal Investigation (DVI)*"** terdiri dari 1 (satu) arah bijak sebagai berikut:
1. Meningkatkan profesionalisme peran dan fungsi Dokkes dalam mendukung penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat
- Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a. Melaksanakan kegiatan dokpol dan lab dokkes terkait *Scientific Crime Investigation (SCI)* dalam mendukung lidik dan sidik tindak pidana;
 - b. Memberikan dukungan saksi/ahli dalam penyelesaian tindak pidana.
- d. Sasaran prioritas **"Mewujudkan pengelolaan SDM dokkes polri yang modern dan transparan serta pembangunan kapasitas SDM yang sehat, cerdas, berintegritas dan profesional"** terdiri dari 5 (lima) arah bijak sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas SDM polri yang unggul dan humanis di era digital dan kemajuan teknologi;
- Untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a. Peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel jajaran dokkes polri ;
 - b. Kerjasama pendidikan tingkat doktoral, magister, subspesialis, spesialis, profesi, sarjana, diploma yang berkaitan dengan kompetensi di bidang dokkes;
 - c. Kerjasama dikbang dengan eksternal;
 - d. Melaksanakan dan meningkatkan pelatihan pada fungsi fokes polri berbasis informasi
2. Melanjutkan dan meningkatkan kerjasama pendidikan serta pelatihan baik di dalam maupun luar negeri fungsi dokkes polri;
- Untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a. Meningkatkan kerjasama bidang pendidikan serta pelatihan baik didalam/luar negeri pada fungsi dokpol;

- b. Meningkatkan kerjasama bidang pendidikan serta pelatihan baik didalam/luar negeri pada fungsi kespol;
 - c. Meningkatkan kerjasama bidang pendidikan serta pelatihan baik didalam/luar negeri pada laboratorium dokkes;
 - d. Meningkatkan kerjasama bidang pendidikan serta pelatihan baik didalam/luar negeri pada sumber daya;
3. Melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja pada dokkes polri:
Untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a. Mengoptimalkan penilaian kinerja berbasis SIPK dan E-Kinerja;
 - b. Mengoptimalkan peran fungsi pengawasan pada personel dokkes polri.
4. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisa Beban Kinerja (ABK), Sistem Informasi Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan (SIK3) dan pengembangan struktur organisasi Polri;
Untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a. Melaksanakan pengkajian klasifikasi struktur organisasi Polda Jatim di tingkat kesatuan kewilayahan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIK3 ;
 - b. Mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) disetiap satker dengan melakukan kajian kelembagaan baik bidang pembinaan maupun bidang operasional;
5. Meningkatkan kesejahteraan, pelayanan dan fasilitas Kesehatan, perumahan serta keselamatan bagi aparaturnya Polri dan keluarganya Polda Jatim;
Untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan
- a. Melaksanakan pelayanan administrasi pegawai berkaitan dengan BPJS, asuransi Jamkestama dan dalam pemenuhan perumahan ASABRI dan YKPP (Yayasan Kesejahteraan Perumahan dan Pendidikan) bagi anggota Polri/PNS ;
 - b. Peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) oleh Komisi Akreditasi Rumah sakit (KARS);
 - c. meningkatkan pelayanan Kesehatan promotive, preventif, deteksi, kuratif, rehabilitatif, secara paliatif;
 - d. optimalisasi aplikasi e-yankes terkait kecepatan informasi dan pelayanan bagi;
 - e. Pembangunan dan peningkatan fasilitas Kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas Kesehatan Tingkat lanjut (FKTL);

- f. Peningkatan faskes dalam rangka pelayanan Kesehatan, baik pada Tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan Kesehatan yang prima kepada aparaturnya polri dan Masyarakat umum;
- e. Sasaran prioritas **“Pemenuhan sarana prasarana, Almatsus polri, dan fasilitas konstruksi Polda Jatim yang modern dan memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi berbasis minimum essential police equipment (MEPE)”**, terdiri dari 3 (tiga) arah kebijaksanaan yaitu:
1. Memenuhi sarana dan prasarana dan Almatsus Dokkes Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
untuk mewujudkan arah kebijaksanaan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a. Menginventarisir renbut sarpras Alkes serta Almatsus di lingkungan Dokkes Polri;
 - b. Merencanakan dan mengusulkan renbut sarpras alkes serta almatsus Dokkes Polri;
 - c. Pemenuhan sarpras yang modern melalui pengadaan (Matfaskes dan almatsus) secara bertahap.
 - d. mendistribusikan Alpalkam dan Almatsus sesuai dengan peruntukannya;
 - e. melakukan usulan penghapusan Almatsus dan infrastruktur TIK yang kondisinya rusak berat;
 - f. mengajukan rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus dari satker biddokkes Polda Jatim dan jajaran.
 - g. melakukan pelatihan dan pemberdayaan anggota biddokkes dalam kesiapsiagaan dalam pengamanan PNPP maupun Masyarakat di bidang Kesehatan dengan peralatan Kesehatan yang terkini dan modern;
 - h. Pembenahan sarana dan prasarana, SDM, jenis, dan komitmen pelayanan FKTP Polri sesuai standar dan menyiapkan FKTP Polri yang terakreditasi dengan norma kapitasi dan kepesertaan tertinggi;
 - i. membangun dan mengembangkan system komunikasi di wilayah pulau terluar dan wilayah rawan bencana
 2. Meningkatkan pengembangan Almatsus Dokkes Polri terkait SCI;
Untuk mewujudkan arah kebijaksanaan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a. Menyusun dan mengusulkan kebutuhan almatsus Dokpol, Laboratorium Dokkes, Farmapol, DNA, Biomedik, DVI dan Odontopol;
 - b. Pengadaan Almatsus Dokpol, Laboratorium Dokkes, Farmapol, DNA, Biomedik, DVI dan Odontopol;

c. pemerliharaan almatsus Dokpol, Laboratorium Dokkes, Farmapol, DNA, Biomedik, DVI dan Odontopol.

3. Peningkatan pemenuhan rumah dinas pegawai Polri dan pembangunan fasilitas perkantoran di Polda Jatim dan rumah dinas di wilayah pulau terluar berpenghuni;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a. mengajukan rencana kebutuhan anggaran untuk fasilitas perkantoran Polda Jatim;
- b. melanjutkan Pembangunan rumah sakit atau layanan Kesehatan lainnya yang dekat dengan tempat tinggal personel dan Masyarakat guna mendukung “Reformasi System Kesehatan Nasional”; (giat 5062 /prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/ SP5);

f. Sasaran prioritas **“mewujudkan dokkes polri melalui peningkatan budaya integritas, akuntabilitas, dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian”** terdiri dari 2 (dua) arah bijak sebagai berikut:

1. Memperkuat penanganan publik komplain di lingkungan Dokkes Polri secara efektif dan terpercaya berbasis Online.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

- a. Membuka akses laporan dari masyarakat melalui Media Elektronik;
 - b. Memberi pendampingan pada satker Dokkes jajaran bila ada komplain;
 - c. Membentuk tim penanganan komplain dan melaksanakan tindak lanjut;
2. Meningkatkan pelaksanaan tatakelola manajemen kinerja perencanaan, penganggaran, dan keuangan dokkes polri yang transparan dan akuntabel;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a. Melaksanakan perencanaan, penganggaran, dan keuangan yang tranparan dan akuntabel;
- b. Melaksanakan Reviu Anggaran Pada Setiap Tahapan;
- c. Berkoordinasi dengan Rorena Polri.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Rumkit Bhayangkara Bojonegoro tahun 2025

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan kebijakan Biddokkes Polda Jatim maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi Rumkit Bhayangkara Bojonegoro Biddokkes Polda Jatim pada Tahun 2025, sebagai berikut :

- a. Sasaran prioritas **"Memantapkan peran dokkes polri dalam memelihara kamtibmas di seluruh wilayah indonesia secara prediktif dan proaktif"** terdiri dari 7 (tujuh) arah bijak sebagai berikut:
1. Mengedapankan peran dokkes polri dalam penanganan konflik secara humanis;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a. Melaksanakan bhakti kesehatan polri;
 - b. Memberikan dukungan keslap pada pasukan polri di daerah konflik;
 - c. Pemetaan dan pembuatan data base DNA berkaitan dengan penanganan konflik;
 - d. Pemetaan dan pembuatan data base odontogram berkaitan dengan penanganan konflik
 2. Meningkatkan peran Dokkes dalam mengoptimalkan Kamseltibcar lantas guna memberikan rasa aman di tengah masyarakat baik saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
 - a. Menyusun pedoman pelaksanaan rikkes SIM;
 - b. Melaksanakan rikkes SIM;
 - c. Memenuhi kebutuhan sarpras;
 - d. Pemeriksaan narkoba dan alkohol pada pengemudi berkolaborasi dengan *stakeholder* terkait;
 3. Meningkatkan dan melanjutkan peran aktif dokkes polri di wilayah rawan gempa, bencana, dan slum area;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
 - a. Menyelenggarakan Bhakti sosial kesehatan polri;
 - b. Memberikan dukungan keslap pada pasukan polri di daerah rawan bencana;
 - c. Pengambilan sampel DNA dan odontogram berkaitan dengan korban bencana (DVI);
 - d. Memberikan dukungan evakuasi korban bencana;
 - e. Memberikan dukungan pelaksanaan olah TKP Aspek Medik.

4. Meningkatkan penggelaran fungsi dokkes dalam operasional kepolisian dan back up kewilayahan dalam rangka pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik, dan menjalin sinergitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan;.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
 - a. Menyiapkan personel, sarpras dan anggaran;
 - b. Memberikan dukungan keslap pada pasukanpolri di daerah konflik;
 - c. Membentuk tim satgas untuk pelaksanaan back up kewilayahan;
 - d. Melaksanakan pelatihan untuk mempersiapkan personel
5. Meningkatkan kerjasama kepolisian di bidang dokkes polri dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
 - a. Meningkatkan kerjasama Dalam/Luar Negeri di bidang Dokpol;
 - b. Meningkatkan kerjasama Dalam/Luar Negeri di bidang Kespel;
 - c. Meningkatkan kerjasama Dalam Luar Negeri dibidang Laboratorium Dokkes;
 - d. Meningkatkan kerjasama Dalam/Luar negeri di bidang Sumber Daya.
6. Mendukung kegiatan tahapan pengamanan event nasional/internasional tahun 2025;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
 - a. Meningkatkan kesiapan personel, sarpras, dan anggaran dalam rangka pembentukan tim keslap, *food safety* dalam pamkes *event* nasional/internasional serta pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun 2025;
 - b. Melaksanakan asistensi dan supervisi kegiatan pamkes event nasional/internasional serta pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun 2025;
 - c. Meningkatkan kesiapan tim DVI pada event nasional/internasional serta pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun 2025;
7. Meningkatkan peran aktif Polda Jatim di wilayah rawan gempa dan bencana alam dan *Slum Area*;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a. Bersama instansi terkait melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat yang berdampak bencana;

- b. Mengoptimalkan pengaman dan back up satuan kewilayahan dengan menggunakan bantuan satwa dalam rangka bantuan SAR terbatas penanganan bencana alam);.
- b. Sasaran prioritas **"Mewujudkan kualitas pelayanan publik pada dokkes polri yang semakin inovatif berbasis digital"**, terdiri dari 3 (tiga) arah bijak sebagai berikut:
- 1. Mengoptimalkan saran dan prasarana yang tersedia pada sentra pelayanan publik pada dokkes polri yang berbasis TI (Teknologi Informasi);
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a. Menerapkan layanan dokkes polri berbasis TI (teknologi Informasi);
 - b. Menyiapkan fasyankes dokkes polri yang modern dan berkualitas;
 - c. Pengembangan sistem informasi digital fungsi dokkes yang terintegrasi;
 - 2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kedokteran dan kesehatan Polri baik dari FKTP maupun dari RS Bhayangkara;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan
 - a. Menyiapkan SDM dokkes yang memenuhi persyaratan standar tinggi di bidang kompetensi teknis, leadership dan kompetensi etik;
 - b. Menyelenggarakan fasyankes yang terakreditasi;
 - c. Melaksanakan pengawasan internal dan eksternal pad ajaran dokkes polri;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta supervisi jajaran dokkes polri;
 - e. Melaksanakan zona integritas untuk mewujudkan WBK/WBBM.
 - f. melakukan penilaian indeks kepuasan Masyarakat (IKM) setiap bulan;
 - g. meningkatkan pelayanan publik polda Jatim dengan melaksanakan pelayanan prima dan informasi melalui aplikasi yankes presisi dan rikkes berkala;
 - 3. Mengoptimalkan "ketanggapsegeraan" dalam melayani masyarakat sesuai standar operasional prosedur (SOP);
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a. Melaksanakan "ketanggapsegeraan" melalui bidang Dokpol;
 - b. Melaksanakan "ketanggapsegeraan" melalui bidang:kesemaptaan
 - c. Menyelenggarakan fasyankes yang terakreditasi.
 - d. Mengoptimalkan "respon time" dalam memberikan bantuan teknis satwa dalam melakukan pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban;

- e. Melaksanakan giat deteksi dini narkoba segera guna mendeteksi dampak penyalahgunaan narkoba di masyarakat;
 - f. Kemudahan pemberian surat rujukan untuk FKTP ke FKTL dengan berbasis Pcare;
 - g. Melakukan penanganan bencana DVI dengan professional dan terintegrasi
- c. Sasaran Prioritas **"Penguatan peran dan fungsi Dokkes guna mendukung penegakkan hukum secara adil, transparan, legal, dan humanis berdasarkan *Scientific Criminal Investigation (DVI)*"** terdiri dari 1 (satu) arah bijak sebagai berikut:
- 1. Meningkatkan profesionalisme peran dan fungsi Dokkes dalam mendukung penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat
- Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- c. Melaksanakan kegiatan dokpol dan lab dokkes terkait *Scientific Crime Investigation (SCI)* dalam mendukung lidik dan sidik tindak pidana;
 - d. Memberikan dukungan saksi/ahli dalam penyelesaian tindak pidana.
- d. Sasaran prioritas **"Mewujudkan pengelolaan SDM dokkes polri yang modern dan transparan serta pembangunan kapasitas SDM yang sehat, cerdas, berintegritas dan profesional"** terdiri dari 5 (lima) arah bijak sebagai berikut:
- 1. Meningkatkan kualitas SDM polri yang unggul dan humanis di era digital dan kemajuan teknologi;
- Untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a. Peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel jajaran dokkes polri ;
 - b. Kerjasama pendidikan tingkat doktoral, magister, subspesialis, spesialis, profesi, sarjana, diploma yang berkaitan dengan kompetensi di bidang dokkes;
 - c. Kerjasama dikbang dengan eksternal;
 - d. Melaksanakan dan meningkatkan pelatihan pada fungsi fokes polri berbasis informasi
- 2. Melanjutkan dan meningkatkan kerjasama pendidikan serta pelatihan baik di dalam maupun luar negeri fungsi dokkes polri;
- Untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- e. Meningkatkan kerjasama bidang pendidikan serta pelatihan baik didalam/luar negeri pada fungsi dokpol;
 - f. Meningkatkan kerjasama bidang pendidikan serta pelatihan baik didalam/luar negeri pada fungsi kespol;
 - g. Meningkatkan kerjasama bidang pendidikan serta pelatihan baik didalam/luar negeri pada laboratorium dokkes;
 - h. Meningkatkan kerjasama bidang pendidikan serta pelatihan baik didalam/luar negeri pada sumber daya;
3. Melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja pada dokkes polri:
Untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- c. Mengoptimalkan penilaian kinerja berbasis SIPK dan E-Kinerja;
 - d. Mengoptimalkan peran fungsi pengawasan pada personel dokkes polri.
4. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisa Beban Kinerja (ABK), Sistem Informasi Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan (SIK3) dan pengembangan struktur organisasi Polri;
Untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a. Melaksanakan pengkajian klasifikasi struktur organisasi Polda Jatim di tingkat kesatuan kewilayahan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIK3 ;
 - b. Mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) disetiap satker dengan melakukan kajian kelembagaan baik bidang pembinaan maupun bidang operasional;
5. Meningkatkan kesejahteraan, pelayanan dan fasilitas Kesehatan, perumahan serta keselamatan bagi aparatur Polri dan keluarganya Polda Jatim;
Untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan
- a. Melaksanakan pelayanan administrasi pegawai berkaitan dengan BPJS, asuransi Jamkestama dan dalam pemenuhan perumahan ASABRI dan YKPP (Yayasan Kesejahteraan Perumahan dan Pendidikan) bagi anggota Polri/PNS :
 - b. Peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) oleh Komisi Akreditasi Rumah sakit (KARS);
 - c. meningkatkan pelayanan Kesehatan promotive, preventif, deteksi, kuratif, rehabilitatif, secara paliatif;
 - d. optimalisasi aplikasi e-yankes terkait kecepatan informasi dan pelayanan bagi;
 - e. Pembangunan dan peningkatan fasilitas Kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas Kesehatan Tingkat lanjut (FKTL);

- f. Peningkatan faskes dalam rangka pelayanan Kesehatan, baik pada Tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan Kesehatan yang prima kepada aparaturnya polri dan Masyarakat umum;
- e. Sasaran prioritas **“Pemenuhan sarana prasarana, Almatsus polri, dan fasilitas konstruksi Polda Jatim yang modern dan memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi berbasis minimum essential police equipment (MEPE)”**, terdiri dari 3 (tiga) arah kebijakan yaitu:
 - 2. Memenuhi sarana dan prasarana dan Almatsus Dokkes Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - j. Menginventarisir renbut sarpras Alkes serta Almatsus di lingkungan Dokkes Polri;
 - k. Merencanakan dan mengusulkan renbut sarpras alkes serta almatsus Dokkes Polri;
 - l. Pemenuhan sarpras yang modern melalui pengadaan (Matfaskes dan almatsus) secara bertahap.
 - m. mendistribusikan Alpalkam dan Almatsus sesuai dengan peruntukannya;
 - n. melakukan usulan penghapusan Almatsus dan infrastruktur TIK yang kondisinya rusak berat;
 - o. mengajukan rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus dari satker biddokkes Polda Jatim dan jajaran.
 - p. melakukan pelatihan dan pemberdayaan anggota biddokkes dalam kesiapsiagaan dalam pengamanan PNPP maupun Masyarakat di bidang Kesehatan dengan peralatan Kesehatan yang terkini dan modern;
 - q. Pembenahan sarana dan prasarana, SDM, jenis, dan komitmen pelayanan FKTP Polri sesuai standar dan menyiapkan FKTP Polri yang terakreditasi dengan norma kapitasi dan kepesertaan tertinggi;
 - r. membangun dan mengembangkan system komunikasi di wilayah pulau terluar dan wilayah rawan bencana
 - 3. Meningkatkan pengembangan Almatsus Dokkes Polri terkait SCI;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - d. Menyusun dan mengusulkan kebutuhan almatsus Dokpol, Laboratorium Dokkes, Farmapol, DNA, Biomedik, DVI dan Odontopol;
 - e. Pengadaan Almatsus Dokpol, Laboratorium Dokkes, Farmapol, DNA, Biomedik, DVI dan Odontopol;

- f. pemerliharaan almatsus Dokpol, Laboratorium Dokkes, Farmapol, DNA, Biomedik, DVI dan Odontopol.
- 4. Peningkatan pemenuhan rumah dinas pegawai Polri dan pembangunan fasilitas perkantoran di Polda Jatim dan rumah dinas di wilayah pulau terluar berpenghuni;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- c. mengajukan rencana kebutuhan anggaran untuk fasilitas perkantoran Polda Jatim;
 - d. melanjutkan Pembangunan rumah sakit atau layanan Kesehatan lainnya yang dekat dengan tempat tinggal personel dan Masyarakat guna mendukung “Reformasi System Kesehatan Nasional”; (giat 5062 /prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/ SP5);
- f. Sasaran prioritas **“mewujudkan dokkes polri melalui peningkatan budaya integritas, akuntabilitas, dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian”** terdiri dari 2 (dua) arah bijak sebagai berikut:
- 1. Memperkuat penanganan publik komplain di lingkungan Dokkes Polri secara efektif dan terpercaya berbasis Online.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
 - a. Membuka akses laporan dari masyarakat melalui Media Elektronik;
 - b. Memberi pendampingan pada satker Dokkes jajaran bila ada komplain;
 - c. Membentuk tim penanganan komplain dan melaksanakan tindak lanjut;
 - 2. Meningkatkan pelaksanaan tatakelola manajemen kinerja perencanaan, penganggaran, dan keuangan dokkes polri yang transparan dan akuntabel;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a. Melaksanakan perencanaan, penganggaran, dan keuangan yang tranparan dan akuntabel;
 - b. Melaksanakan Reviu Anggaran Pada Setiap Tahapan;
 - c. Berkoordinasi dengan Rorena Polri

BAB IV

PROGRAM KEGIATAN DAN PAGU ANGGARAN

1. Program dan Kegiatan

Pada T.A. 2025 Rumkit Bhayangkara Bojonegoro menyusun rincian sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen

1) Tujuan :

Menyelenggarakan Fungsi Manajemen kinerja Rumkit Bhayangkara Bojonegoro secara optimal dengan melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pelaporan, Pelayanan internal, Pelayanan Kesehatan dan Pembayaran Gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi.

2) Kegiatan :

a) Layanan kesehatan BLU

- (1) Belanja gaji dan tunjangan (BLU).
- (2) Belanja barang (BLU).
- (3) Belanja jasa (BLU).
- (4) Belanja pemeliharaan (BLU).
- (5) Belanja perjalanan (BLU).
- (6) Belanja barang persediaan barang konsumsi (BLU).
- (7) Belanja barang persediaan lainnya (BLU).

b) Pelayanan Dukungan Manajemen Kesehatan

(1) Pelayanan Yankes

(a) Kecelakaan Kerja

- Penyakit / kecelakaan tanpa tindakan operasi.
- Penyakit / kecelakaan dengan Tindakan ops mulai dari operasi ringan sampai dengan khusus.

(b) Pelayanan kesehatan akibat pelaksanaan tugas latihan dan operasi Polri.

- Fogging.
- Pelayanan kesehatan dengan sarana dan prasarana yang lebih tinggi sesuai kondisi pasien.

(c) Pembinaan Kesehatan Gigi Pegawai Negeri pada Polri.

- Pemeliharaan kesehatan gigi (dental fitness)

2) Pelayanan Dokpol.

- (a) Kedokteran Forensik pembuatan VER Korban Mati.
 - Pemeriksaan luar Jenasah
- (b) Rikkes Tahanan
 - Rawat inap tahanan tanpa tindakan operasi.
 - Rawat inap tahanan dengan tindakan operasi
- (c) Kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat
 - Keslap khusus.
 - Keslap rutin.
- (d) Geomedicine (khusus masalah kesehatan yang terkait dengan kamtibmas)
 - Peta Geomedik
- (e) Belanja barang persediaan barang konsumsi.
 - Deteksi dini Narkoba
 - Vaksin Influenza
 - Food Scurity
- (g) Perjalanan dinas pelayanan kesehatan tertentu (dalam kota dan luar kota)

c) Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri

- (1) Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan.
 - (a) Dukungan operasional Satker
- (2) Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- (3) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan perkantoran
 - (a) Penyusunan Naskah Dinas Buku Lainnya
 - (b) Penyusunan Program, Anggaran dan Rencana Kerja
 - Penyusunan Rancangan Renja TA 2025.
 - Penyusunan Renja TA 2025.
 - Penyusunan produk perencanaan TA 2025
 - (c) Penyusunan RKA-KL dan DIPA.
 - Pemutakhiran data susun RKA-KL, TOR /RAB dan DIPA

- Sosialisasi Dipa dan Penandatanganan Pakta Integritas
- (c) Pengadaan peralatan / perlengkapan kantor
 - Dukungan sehari – hari perkantoran
- (d) Penyusunan dan Evaluasi LAKIP
- (f) Penyusunan perjanjian kinerja
- (g) Pengadaan Peralatan Perkantoran
- (h) Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan.
 - Honor KPA
 - Honor Bendahara
 - Honor PPSPM
 - Honor PPK
 - Honor SAKPA.
 - Honor SIMAK BMN.
 - Honor SIRENA
 - Honor SAKTI

b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri

1) Tujuan:

Menyelenggarakan modernisasi almatsus peningkatan sarana prasarana Rumkit Bhayangkara Bojonegoro secara optimal dengan melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian serta Pelaporan yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi.

2) Kegiatan :

- a) Peralatan dan fasilitas perkantoran.
 - (1) Belanja alat kesehatan (BLU).
 - (2) Belanja non alat kesehatan (BLU).
- b) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
 - (1) Har Gedung
 - (2) Har Kendaraan Roda 4.
 - (3) Har Komputer.
 - (4) Har AC.
 - (5) Har Printer.
 - (6) Har Alkes.

- (7) Biaya Listrik.
- (8) Biaya Air.
- (10) Pengadaan BMP

2. Pagu Anggaran Tahun 2025

Pagu anggaran Rumkit Bhayangkara Bojonegoro T.A 2025, Sebesar Rp. 31.064.889.000,- dengan perincian sebagai berikut :

a Program Dukungan Manajemen Rp. 28.746.821.000,-

Digunakan untuk kegiatan :

- 1) Layanan Kesehatan BLU Rp. 24.700.000.000
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan (Rp. 6.958.000.000)
 - b) Belanja barang (Rp. 2.261.592.000)
 - c) Belanja jasa (Rp. 7.194.208.000)
 - d) Belanja Pemeliharaan (Rp. 372.400.000)
 - e) Belanja perjalanan (Rp. 350.000.000)
 - f) Belanja barang persediaan barang konsumsi (Rp. 477.541.000)
 - g) Belanja barang persediaan lainnya (Rp. 7.086.259.000)
- 2) Layanan Dukungan Manajemen Kesehatan Rp. 612.876.000
 - a) Kedokteran Forensik Pembuatan VER Korban mati (Rp. 6.300.000)
 - (1) pemeriksaan luar (Rp. 6.300.000)
 - b) Rikkes Tahanan (Rp. 13.105.000)
 - (1) Rawat inap tahanan tanpa tindakan operasi (Rp. 5.730.000).
 - (2) Rawat inap tahanan dengan tindakan operasi (Rp. 7.375.000)
 - c) Kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat (Rp. 14.366.000)
 - (1) Keslap khusus (Rp. 11.016.000)
 - (2) Keslap rutin (Rp. 3.350.000)
 - d) Geomedicine (khusus masalah kesehatan yang terkait dengan kamtibmas) (Rp 3.500.000)
 - (1) Peta Geomedik (Rp. 3.500.000)
 - e) Belanja barang persediaan barang konsumsi (Rp. 358.000.000)
 - (1) Deteksi dini narkoba (Rp. 180.000.000)
 - (2.) Vaksin Influenza (Rp. 170.500.000)

- (3.) Food Scurity (13.675.000)
 - f) Perjalanan dinas pelayanan kesehatan (Rp. 34.850.000)
 - (1) Jaldi biasa (Rp. 34.850.000)
 - (2) Jaldi dalam kota (Rp. 5.000.000)
 - g) Kecelakaan Kerja (Rp. 66.300.000)
 - (1) Penyakit / kecelakaan Tanpa tindakan operasi (Rp. 26.300.000)
 - (2) Penyakit / kecelakaan dengan Tindakan ops ringan sampai dengan operasi besar (Rp. 40.000.000)
 - h) Pelayanan kesehatan akibat pelaksanaan tugas latihan dan operasi Polri (Rp. 109.480.000)
 - (1) Fogging (Rp. 66.600.000)
 - (2) Pengendalian wabah tanpa vaksinasi (Rp.9.300.000)
 - (3) Pelayanan kesehatan dengan sarana dan prasarana yang lebih tinggi sesuai dengan kondisi pasien (Rp. 33.580.000i
 - i) Pembinaan Kesehatan Gigi Pegawai Negeri pada Polri. (Rp. 5.100.000).
- (3) Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri Rp. 3.433.945.000
- a) Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan Rp.100.000.000
 - (1) Dukungan Operasional Lainnya (Rp. 100.000.000)
 - b) Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Rp. 3.138.734.000)
 - c) Penyusunan Naskah Buku Lainnya (Rp 10.080.000)
 - d) Penyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan (Rp 44.760.000).
 - 1) Honor SIMAK BMN (Rp. 1.500.000)
 - 2) Honor SAKPA (Rp. 1.500.000)
 - 3) Honor SIRENA (Rp. 3.600.000)
 - 4) Honor SAKTI (Rp. 3.600.000)
 - 5) Honor KPA (Rp 12.300.000)
 - 6) Honor PPK (Rp 11.940.000)
 - 7) Honor PPSPM (Rp. 5.520.000)
 - 8) Honor Bendahara Pengeluaran (Rp. 4.800.000)
 - e) Penyusunan Program, anggaran dan Rencana Kerja (Rp 769.000).
 - (1) Penyusunan Rancangan Renja TA 2025 (Rp. 122.000).
 - (2) Penyusunan Renja TA 2026 (Rp.122.000).

- (3) Penyusunan produk produk perencanaan TA. 2024 (Rp. 510.000)
 - (4) Pemutahiran data (Rp 15.000)
 - f) Penyusunan RKA-KL, TOR/RAB dan DIPA (Rp. 595.000)
 - g) Penyusunan Evaluasi LKIP (Rp. 84.000).
 - h) Penyusunan dan Perjanjian Kinerja (Rp. 63.000)
 - i) Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor (Rp. 60.440.000)..
- b. Program Moderanisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Aparatur Polri Rp. 2.318.068.000,-
- (1) Belanja Peralatan Kesehatan (Rp. 805.445.000)
 - (2) Belanja Peralatan Kantor (Rp. 194.555.000)
 - (2) Belanja Pemeliharaan Gedung Negara (Rp. 300.000.000)
 - (3) Belanja Pemeliharaan Roda 4 (Rp.85.338.000)
 - (4) Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor (Rp. 59.820.000)
 - (5) Belanja Pemeliharaan Alkes (Rp. 44.400.000)
 - (6) Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin (BMP) (Rp 172.972.000)
 - (7) Biaya Listrik (Rp. 553.500.000)
 - (8) Biaya Air (Rp. 2.038.000)

3. Kegiatan Pagu Anggaran/RKA -KL

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Polri meliputi :
 - (1) Pelayanan Yankes
 - (2) Pelayanan Dokpol
- b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- c. Menyelenggarakan Pelayanan Internal Perkantoran Polri.
- d. Menyelenggarakan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
- e. Menyelenggarakan Operasional Pertahanan dan Keamanan.
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana Aparatur Polri.

BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Rumkit Bhayangkara Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 disusun untuk dijadikan dasar atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Rumkit Bhayangkara Bojonegoro sehingga dapat terwujud kesamaan persepsi serta tindakan untuk mencapai sasaran tugas secara optimal.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : Desember 2024
PS KARUMKIT BHAY. WAHYU TUTUKO BOJONEGORO



dr. LINDAWATI Sp.M
KOMISARIS POLISI NRP 78041235

LAMPIRAN :

1. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
2. Rincian Kertas Kerja

LAMPIRAN I

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2025

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

RS BHAY WAHYU TUTUKO BOJONEGORO T.A. 2024

NO	SASARAN STRATEGIS			KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	
1	2	3	4	5
1.	Terselenggaranya pelayanan Kedokteran Kepolisian secara professional dan paripurna dalam rangka mendukung tugas operasional Polri.	1. Presentase pelayanan Dokpol.	92 %	
2.	Terselenggaranya pelayanan Kesehatan yang paripurna, bermutu dan merata di Wilayah Bojonegoro dan sekitarnya.	1. Presentase peningkatan pasien rawat jalan 2. Presentase peningkatan pasien rawat inap 3. Presentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM)	104 % 104 % ≥80 %	
3	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Rumkit Bhayangkara Bojonegoro yang akuntabel guna mendukung tata elola yang bersih, terbuka, dan Tansparan	1. Indek kepuasan pelayanan pasien. 2. Presentase penanganan complain terkait pelayanan kesehatan 3. Nilai Kinerja Anggaran	80 45 % 90	

Ditetapkan di Bojonegoro
 pada tanggal : 30 Desember 2024
 RS KARUMKIT BHAY. WAHYU TUTUKO BOJONEGORO



[Signature]
 dr. LINDAWATI Sp.M
 KOMISARIS POLISI NRP 78041235